



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I KETUT KARIYASA
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 548286

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.939.525.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m²/42 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.510.000.000
2. Tanah Seluas 2.250 m² di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 347.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/100 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/100 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
5. Tanah Seluas 3.900 m² di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 258.375.000
6. Tanah Seluas 1.111 m² di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 166.650.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/56 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 637.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **252.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA N MAX NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 374.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.291.673.484

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 245.681.492

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.103.479.976

III. HUTANG Rp. 174.578.971

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.928.901.005

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUH. IMRAN IBRAHIM
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 1005740

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	200.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/38 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 200.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	795.780
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	995.780

III. HUTANG **Rp.** **300.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **-299.004.220**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TUTY HERAWATI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 225394

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	163.230.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/75 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 163.230.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	251.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA ALL NEW V ELOZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.680
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	430.230.680
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	430.230.680

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.